

BAB VI

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker), saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa PKPA harus membekali diri dengan pengetahuan tentang oobat-obatan, pelayanan kefarmasian, manajemen serta perundang-undangan yang terkait.
2. Mahasiswa PKPA harus berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan praktek sehingga diharapkan akan memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan sebagai bekal saat berada dalam dunia kerja.
3. Mahasiswa PKPA diharapkan untuk mempelajari ilmu komunikasi atau memperlengkapi diri dengan kemampuan komunikasi yang baik sehingga dapat berkomunikasi baik dengan pasien. Selain itu, harus menjalin komunikasi baik dengan teman sejawat, tenaga kesehatan lain dan karyawan di apotek.
4. Mahasiswa PKPA diharapkan mempelajari SOP yang ada di apotek sehingga terhindar dari kesalahan yang mungkin dapat terjadi.
5. Mahasiswa PKPA diharapkan mempelajari sistem pengontrolan untuk menghindari kesalahan dalam mengerjakan resep mulai penerimaan, penyiapan dan penyerahan kembali resep ke pasien, harus dikontrol agar tidak terjadi kesalahan.
6. Apotek Kimia Farma Pare 2 diharapkan selalu menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan yang baik kepada pasien.

7. Apotek Kimia Farma Pare 2 diharapkan selalu mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada setiap karyawan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik.
8. Apotek Kimia Farma Pare 2 diharapkan selalu menerapkan pelayanan yang berpihak kepada pasien agar pasien merasa nyaman dan untuk meningkatkan kepercayaan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 1997. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 336/E/SE/77 Tahun 1997 tentang *Salinan Resep Narkotika*.
- BPOM, 2013. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM, 2016. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.

Hartini, Y. S., dan Sulasmono, 2007. *Apotek: Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes tentang Apotek Rakyat*. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang *Obat Wajib Apotek*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 1990 tentang *Obat Wajib Apotek*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 Tahun 2004 tentang *Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit*.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 118/Menkes/SK/IV/2014 tentang *Kompendium Alat Kesehatan*.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang *Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 1993. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/Menkes/Per/X/1993 tentang *Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang *Registrasi Obat Tradisional*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang *Rencana Kebutuhan Tahunan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang *Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indoneisa, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indoneisa, 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang *Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kimia Farma, 2016. *Laporan Tahunan 2016 Annual Report*, PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.

- Lacy, C.F. *et al.*, 2008. *Drug Information Handbook* 17TH Edition. American Pharmacist Association, USA.
- Lestari, E. D., 2007. *Analisis Daya Saing, Strategi, Dan Prospek Industri jamu di Indonesia*. Bogor: Penerbit ITB.
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011. *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Medscape, 2018. Medscape: Drug Interaction Checker. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Maret 2018.
- MIMS, 2018. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/> [online]. Diakses pada Maret 2018.
- Perkeni, 2015. *Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Melitus Tipe di Indonesia*, PB. Perkeni.
- Perki, 2015. *Pedoman Tatalaksana Hipertensi pada Penyakit Kardiovaskular*, Edisi Pertama, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia.
- Rantucci J. Melanie, 2009. *Komunikasi Apoteker-Pasien: Panduan Konseling Pasien*; Alih Bahasa, Aluwi Nirwana Sani; Editor Edisi Bahasa Indonesia, July Manurung, Ed. 2, EGC, Jakarta.
- Seto, S., Nita, Y., dan Triana, L., 2012. *Manajemen Farmasi Lingkungan Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi*, Edisi 3, Juniar Moechtar (Ed), Airlangga University Press, Surabaya.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Pengaturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Sweetman, S.C., 2009. *Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed.*, Pharmaceutical Press, London.

Tietze, K.J., 2004. *Clinical Skills for Pharmacists A Patient-Focused Approach*, 2nd edition, Mosby, St. Louis.

Undang-Undang Republik Indonesia, 1997. UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.